

LAPORAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2017



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA

KATA PENGANTAR

Perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal penting dalam upaya mewujudkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang cepat berubah dan masyarakat yang semakin kritis terhadap pelayanan aparatur pemerintah, instansi pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik melalui kinerja dan pelayanan publik yang memadai. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara setiap akhir tahun melaporkan hasil kerjanya kepada intitusi di atasnya yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kewajiban sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipercaya. Sesuai ketentuan penyusunan Laporan Kinerja maka seperti tahun-tahun sebelumnya Dinas Kominfo Provsu juga melaporkan hasil capaian kinerja selama setahun dengan memakai pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara akuntabel.

Laporan Kinerja Dinas Kominfo Provsu Utara tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Demikianlah kami laporkan, semoga Laporan Kinerja Dinas Kominfo Provsu tahun 2017 ini dapat bermanfaat sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan/keputusan untuk menetapkan program/kegiatan urusan komunikasi dan informatika yang lebih terarah, efektif, berdaya guna dan berhasil guna pada tahun-tahun mendatang. Kami mengharapkan segala saran dan kritik membangun untuk perbaikan dan kebaikan kinerja Dinas Kominfo Provsu.

Medan, Januari 2018

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara,

Drs. H. MHD. FITRIYUS, SH, M.SP
Pembina Utama Madya
NIP. 19621003 198910 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman :
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
1.4 Struktur Organisasi	5
1.5 Fungsi dan Tugas.....	6
1.6 Sistematika	
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1 Rencana Strategis.....	7
2.2 Rencana Kinerja.....	11
2.3 Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1 Capaian Kinerja Berdasarkan RPJMD.....	14
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.3 Capaian Kinerja Program/Kegiatan.....	25
3.4 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.....	26
3.5 Akuntabilitas Keuangan.....	27
BAB IV PENUTUP.....	29
LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Provsu Tahun 2017	
2. Penetapan Kinerja Dinas Kominfo Provsu Tahun 2017	
3. Realisasi Penetapan Kinerja Dinas Kominfo Provsu Tahun 2017	

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab majemen Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan infprmasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Medan, Januari 2018
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara

H. M. Ayub, SE

Ikhtisar Eksekutif

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 disebutkan bahwa Visi Pembangunan Komunikasi dan Informatika yang hendak dicapai adalah “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT INFORMASI YANG BERDAYA SAING DALAM PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI**”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi, tujuan, dan sasaran strategis yang dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya dengan kebijakan yang tepat dan terarah melalui program dan kegiatan. Berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis, Dinas Kominfo Provsu telah menetapkan program dan kegiatan dalam sebuah dokumen penetapan kinerja.

Dokumen penetapan kinerja mengacu kepada Perpres No. 29 tahun 2014 dan Permen PANRB No. 53 Tahun 2014. Dalam peraturan ini, pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi bukan lagi berdasarkan PKK dan PPS yang lebih pada capaian keluaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), tetapi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, secara umum capaian sasaran strategis Dinas Kominfo Provsu tahun 2017 dalam kategori “**memuaskan**” dengan persentase sebesar **106 %**. Jika dibandingkan pada tahun 2016 capaiannya sebesar **76,56 %**. Capaian kinerja Dinas Kominfo Provsu tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar **29,44 %**..

Tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis Dinas Kominfo Provsu tahun 2017 mengacu IKU dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis “**Terwujudnya kualitas kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik**” dengan indikator kinerja Frekuensi layanan informasi kemitraan, yakni capaian kinerjanya “**Memuaskan**” dengan persentase capaian sebesar **99 %**.
2. Sasaran strategis “**Terwujudnya layanan informasi multimedia kepada publik yang mudah, cepat, akuntabel dan transparan**”, dengan indikator kinerja jumlah website SKPD yang hosting pada Pemprovsu, yakni capaian kinerjanya “**Baik**” dengan persentase capaian sebesar **71 %**.
3. Sasaran strategis “**Terwujudnya pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi**”, yakni capaian kinerjanya “**memuaskan**” dengan persentase capaian sebesar **149 %**.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, serapan keuangan Dinas Kominfo Provsu pada 2017 mengalami peningkatan sebesar **14,9%** dibandingkan dengan tahun 2016, dimana pada tahun 2017 serapan keuangannya sebesar **82,80 %** dan tahun 2016 sebesar **67,90 %**.

Bab I

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Oleh karena itu laporan kinerja instansi harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu laporan kinerja juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (*reliable*), berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan. Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah, Dinas Kominfo Provsu sebagai pelaksana urusan bidang komunikasi dan informatika, mempertanggung-jawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi ke depannya.

Laporan Kinerja Dinas Kominfo Provsu Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan inilah, maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi bukan lagi berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang lebih pada capaian keluaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tetapi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kominfo Provsu tahun 2017 diharapkan secara umum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi dan secara internal dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik dan akuntabel, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat maupun lingkungan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah sebagai sarana bagi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dalam menyiapkan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan sesuai visi dan misi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good government dan clean government).

1.3. DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran .
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Undang – undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu Atas laporan Kinerja.
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kominfo provinsi Sumatera Utara
11. Surat edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/13801 tanggal 29 Desember 2017 Tentang penyampaian Laporan Kinerja SKPD Tahun 2017

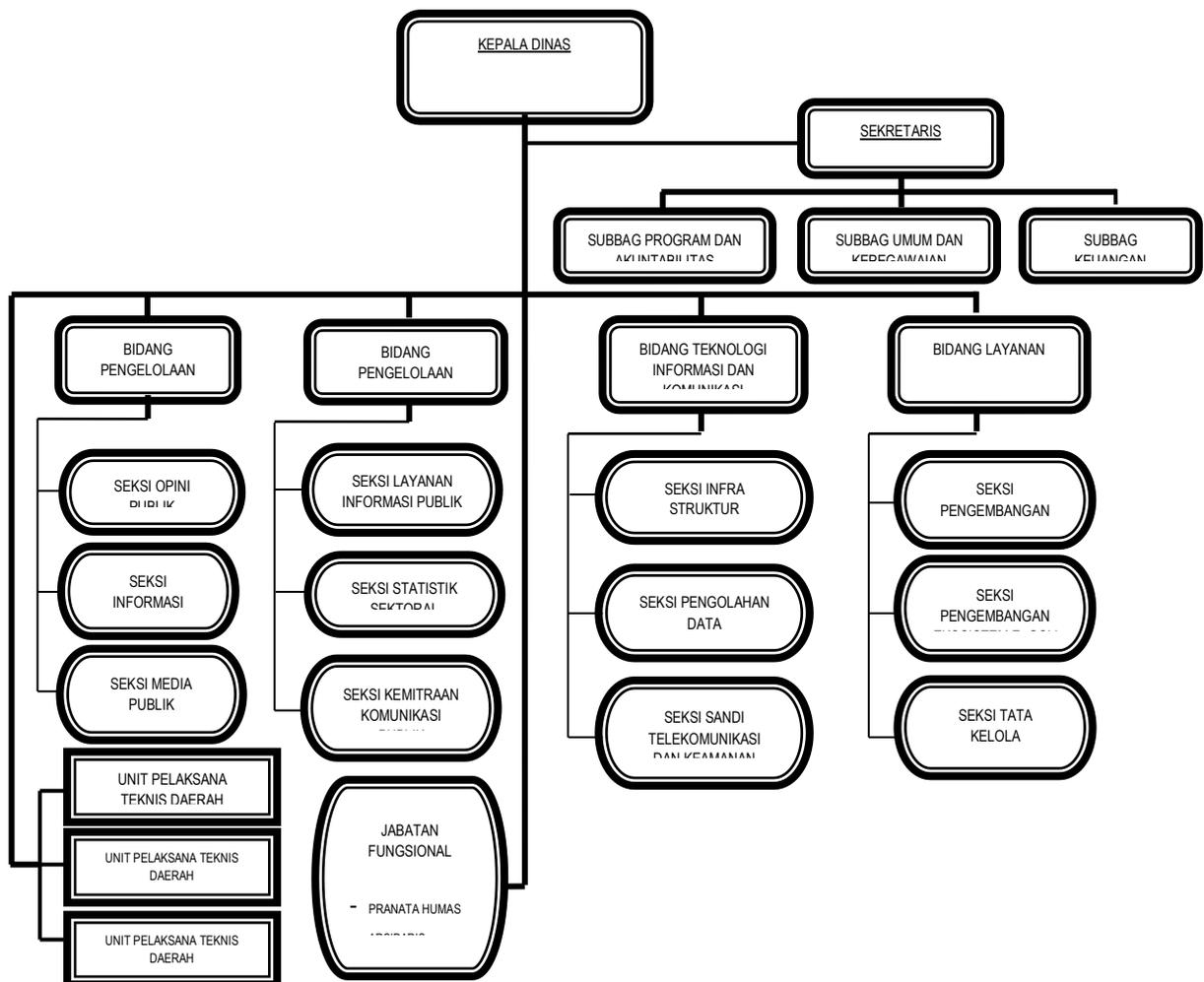
1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera **“Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara merupakan Type A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Bidang Persandian.**

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya secara hirarkis disusun struktur organisasi kelembagaan Dinas Kominfo Provsu terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Bidang Pengelola Informasi Publik
4. Bidang Pengelola Komunikasi Publik
5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Bidang layanan e- Government
7. 3 Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), UPTD Penyiaran Daerah dan UPTD Keterbukaan Informasi

Bagan 1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Provsu secara baik dan akuntabel, kualitas Sumber Daya Manusia sangat penting. Saat ini, berdasarkan data dari Subbagian Umum Dinas Kominfo Provsu per 31 Desember 2017,

Adapun komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1
Komposisi Pegawai Dinas Kominfo Provsu per 31 Desember 2017

1.4.1. Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Struktural	19
	Eselon II (Kepala Dinas)	1
	Eselon III (Kepala Bidang/Sekretaris/Ka. UPTD)	7
	Eselon IV (Kepala Sub.bag/Subbid/Seksi)	24
2	Jabatan Fungsional	6
	Pranata Humas	5
	Arsiparis	1

1.4.2. Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV-e / Pembina Utama	-
2	IV-d / Pembina Utama Madya	1
3	IV-c / Pembina Utama Muda	1
4	IV-b / Pembina Tk. I	3
5	IV-a / Pembina	7
6	III-d / Penata Tk. I	41
7	III-c / Penata	16
8	III-b / Penata Muda Tk. I	45
9	III-a / Penata Muda	7
10	II-d / Pengatur Tk. I	4
11	II-c / Pengatur	12
12	II-b / Pengatur Muda Tk. I	-
13	II-a / Pengatur Muda	4
	J u m l a h	141

1.4.3. Komposisi Pegawai berdasarkan Gender (Jenis Kelamin)

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan
1	IV-e	-	-
2	IV-d	1	-
3	IV-c	1	-
4	IV-b	1	2
5	IV-a	2	5
6	III-d	19	16
7	III-c	8	8
8	III-b	21	24
9	III-a	4	3
10	II-d	3	1
11	II-c	11	1
12	II-b	-	-
13	II-a	4	-
14	I-d	-	-
15	I-c	-	-
16	I-b	-	-
17	I-a	-	-
Jumlah		75	66

Sumber Data: Sub Bagian Umum Dinas Kominfo Provsu

1.5. FUNGSI DAN TUGAS

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada pasal 2 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika.

Untuk itu melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi informasi dan komunikasi publik aplikasi informatika, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. 6. SISTEMATIKA

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PeLaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ditetapkan sistematika laporan kinerja sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai gambaran umum organisasi dan sekilas pengantar lainnya.

- BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja).

- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja.

- BAB IV PENUTUP

- LAMPIRAN

Bab II

Perencanaan Kinerja

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis (Renstra) merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif. Rencana Strategis merupakan bagian yang terintegrasi dari bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memiliki relevansi terhadap pengungkapan kinerja, serta merupakan dokumen perencanaan Dinas Kominfo Provsu untuk periode 5 (lima) tahun dan dijabarkan per tahun yang merupakan rangkaian pembangunan bidang komunikasi dan informatika berkelanjutan.

Renstra Dinas Kominfo Provsu 2013—2018 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2013—2018. Renstra disusun dengan berorientasi pada keberhasilan pelaksanaan RPJMD untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara. Adapun visi tersebut adalah **Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera**.

Dalam kurun waktu 2013—2018 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi, Kementerian Komunikasi dan Informatika dituntut berpandangan jauh ke depan, serta berupaya meningkatkan kualitas agar lebih profesional.

Berkaitan dengan itu, setiap aparatur Dinas Kominfo Provsu didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya sehingga dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung tercapainya masyarakat informasi Indonesia. Untuk mencapai hasil yang diinginkan selama 5 (lima) tahun, Dinas Kominfo Provsu menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran serta rencana kerja yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Dalam rangka pencapaian-pencapaian tersebut, Dinas Kominfo Provsu menetapkan visi **“Terwujudnya Masyarakat Informasi Yang Berdaya Saing Dalam Pemanfaatan Dan Pengembangan Teknologi Informasi”**.



Untuk mencapai visi tersebut Dinas Kominfo Provsu menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan fasilitas dan kapasitas administrasi, program dan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informatika untuk meningkatkan literasi dan profesionalisme.
- 2) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, lembaga media massa, stakeholder bidang komunikasi dan informatika serta masyarakat dalam memperlancar arus informasi yang cepat, tepat dan akuntabel.
- 3) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menunjang pelayanan informasi multimedia yang terprogram, mudah dan akuntabel dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).
- 4) Memanfaatkan dan mengembangkan sarana desiminasi informasi dalam upaya pemerataan akses informasi guna mewujudkan informasi yang transparan dan akuntabel.

Penetapan misi tersebut, tentunya relevan dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018, yakni pada misi pertama, yakni **“membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima (*good governance and clean government*).”**



Dalam rangka mencapai keempat misi Dinas Kominfo Provsu, maka ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Berdasarkan hal itu, Dinas Kominfo Provsu menetapkan tujuan dan sasaran berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018, yaitu :

Dalam kaitan itu, tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran, program dan kapasitas SDM untuk meningkatkan literasi dan profesionalisme, agar rakyat memiliki tempat bertanya.
- b. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika Pemerintah dan masyarakat, lembaga media massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum, agar rakyat memiliki tempat menyampaikan pendapat.
- c. Meningkatkan pelayanan informasi multimedia kepada publik, yang terprogram, akuntabel dan didukung pemberdayaan telematika, agar rakyat tidak buta informasi.
- d. Meningkatkan kualitas pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi dan komunikasi tradisional, cetak dan modern, agar rakyat tidak bertanya sendiri dan menjawab sendiri.

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kominfo Provsu relevan dengan tujuan yang tercantum dalam RPJMD Provsu, yakni pada **TUJUAN PERTAMA**, yakni **MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**.



Selanjutnya, untuk memberikan fokus penyusunan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas berdasarkan tujuan, maka ditetapkan sasaran. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran Dinas Kominfo Provsu adalah :

- a. Terwujudnya kualitas SDM Pegawai Dinas Kominfo Provsu yang kompeten di bidang komunikasi dan informatika dalam peningkatan kinerja.
- a. Terwujudnya kualitas kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik;
- b. Terwujudnya layanan informasi multimedia kepada publik yang mudah, cepat dan akuntabel;
- c. Terwujudnya pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi;

Sasaran yang ingin dikehendaki Dinas Kominfo Provsu, tentunya menacu pada sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara, yakni pada **SASARAN PERTAMA, YAKNI TERWUJUDNYA SISTEM TATA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK BERLANDASKAN HUKUM.**



2.2 RENCANA KINERJA

Rencana kerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kerja tahunan. Dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan.

Dalam dokumen laporan kinerja, capaian kinerja yang diukur oleh setiap instansi pemerintah adalah target kinerja yang diperjanjikan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 16 Desember 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IK/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penetapan IKU di lingkungan instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Selain itu, berfungsi untuk memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait dan membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dapat dikuantifikasi dan diukur. Dalam menetapkan IKU, Dinas Kominfo Provsu mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)
			(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	
1	Frekuensi layanan informasi kemitraan	62 kali	63 kali	69 kali	73 kali	79 kali	84 kali	84 kali
2	Jumlah website SKPD yang hosting pada Pemprov	20 website	30 website	35 website	40 website	45 website	52 website	52 website
3	Frekuensi tersampainya informasi kepada masyarakat	415 kali	576 kali	589 kali	596 kali	608 kali	614 kali	614 kali

Rencana kerja Dinas Kominfo berdasarkan sasaran Startegis adalah

1. Terwujudnya kualitas kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan Informatika Pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik yang ditargetkan dengan frekuensi kegiatan sebanyak 79 kali.
2. Terwujudnya layanan informasi multimedia kepada publik yang mudah, cepat, akuntabel dan transparan melalui website OPD dilingkungan Pemprov dengan target 45 website
3. Terwujudnya pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi yang ditergetkan dengan frekuensi kegiatan sebanyak 608 kali.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil di

lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penetapan Kinerja dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai atasan langsung dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera sebagai eksekutor dari pelaksana program dan kebijakan sebagaimana yang telah digariskan dalam Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai tertuang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2017.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya kualitas kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik;	Frekuensi layanan informasi kemitraan	79 kali
2	Terwujudnya layanan informasi multimedia kepada publik yang mudah, cepat, akuntabel dan transparan;	Jumlah website SKPD yang hosting pada Pemprov	45 website
3	Terwujudnya pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi;	Frekuensi tersampainya informasi kepada masyarakat	608 kali

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga	Rp. 4.065.092.575	APBD
2.	Program Peningkatan Kualitas Informasi Publik	Rp. 10.429.283.425	APBD
3.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 7.149.676.337	APBD
JUMLAH		Rp. 21.644.052.337	

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2017 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2017 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program /kegiatan pada tahun 2017 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

3.1 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN RPJMD

Sebelum melakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Kominfo Provsu, terlebih dahulu akan ditelaah capaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara (RPJMD Provsu) tahun 2013-2018. Analisis capaian kinerja RPJMD Provsu tahun 2013-2018 berdasarkan indikator kinerja SKPD Dinas Kominfo Provsu mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, seperti pada tabel di bawah ini.

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2013*)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)
			2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Komunikasi dan Informatika							
1	Jumlah Jaringan komunikasi (unit)	2	2	2	2	2	2	2
2	Rasio Telepon desa terhadap jumlah desa	56,21	64,64	74,34	85,49	98,31	100	100
3	Rasio Layanan Internet Kecamatan terhadap jumlah kecamatan	81,3	93,49	100	100	100	100	100
4	Jumlah surat kabar nasional / lokal	70	70	70	70	70	70	70
5	Jumlah Penyiaran Radio / TV Lokal	51	51	286	51	51	51	51
6	Website milik Pemerintah Daerah	20	30	35	40	45	52	52
7	Pameran / Expo	2	4	4	4	4	4	4

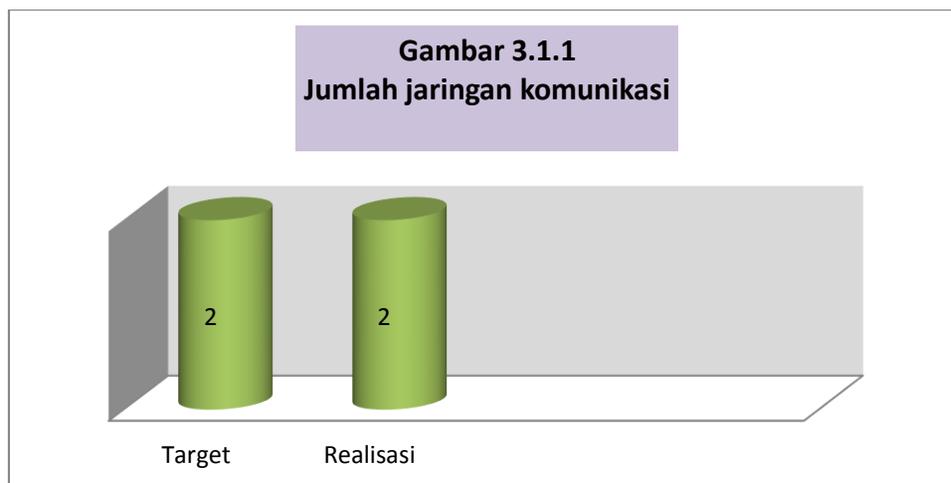
Berdasarkan indikator kinerja di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara bidang Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017 dalam kategori “**memuaskan**” dengan capaian sebesar **132 %**. Capaian kinerja ini didasarkan pada 4 (empat) aspek indikator kinerja pembangunan daerah, yaitu jumlah jaringan komunikasi, jumlah penyiaran, website milik pemerintah daerah dan pameran.

Sedangkan untuk rasio telepon desa terhadap jumlah desa, rasio layanan internet kecamatan terhadap jumlah kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa bidang Pos dan Telekomunikasi sudah menjadi kewenangan Pusat.

Hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu berdasarkan indikator kinerja RPJMD Provsu tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	Jumlah Jaringan komunikasi	2 unit	2 unit

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator jumlah jaringan komunikasi dengan persentase sebesar **100 %**, seperti dapat terlihat pada Gambar 3.1.1 (Jumlah jaringan komunikasi).

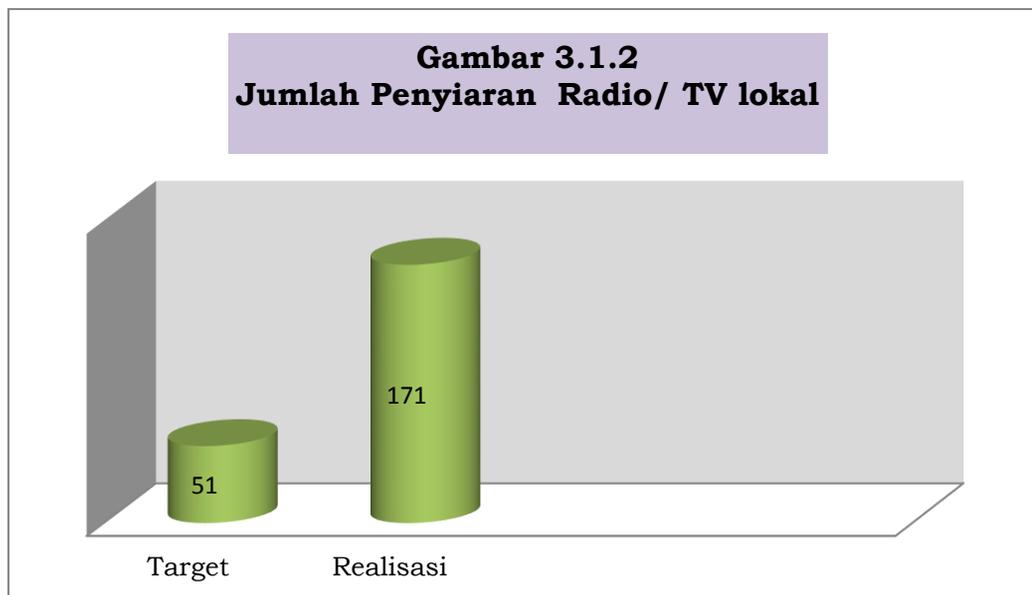


Sebagaimana gambar di atas, pencapaian indikator kinerja jumlah jaringan komunikasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Saat ini jaringan komunikasi yang digunakan Pemprovsu dan dikelola Dinas Kominfo Provsu adalah jaringan internet dan intranet. Namun demikian, perlu adanya peningkatan jumlah jaringan komunikasi yang lebih baik dan relevan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih untuk mendukung kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan *e-government*.

2.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	51	171

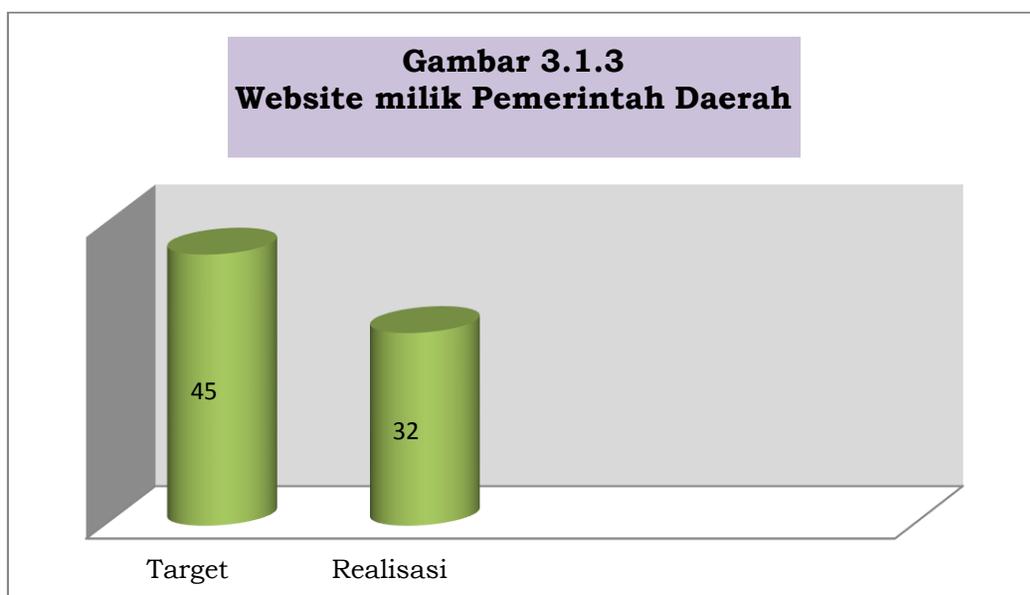
Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator Jumlah penyiaran radio/TV lokal dengan persentase sebesar **335 %** dapat terlihat pada Gambar 3.1.2

Capaian Kinerja untuk jumlah penyiaran Radio/TV Lokal mengalami peningkatan hal ini dikarena UPTD Penyiaran terus melakukan verifikasi ke lembaga penyiaran yang ada dikabupaten/kota .



3.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	Website milik Pemerintah Daerah	45 web	32 web

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator Website milik Pemerintah Daerah dengan persentase sebesar **71 %** dapat terlihat pada Gambar 3.1.3 (Website milik Pemerintah Daerah).

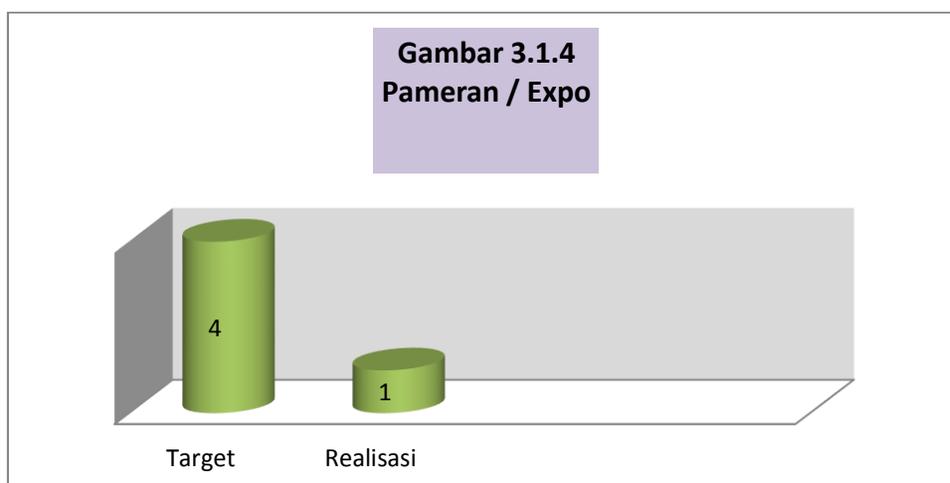


Sebagaimana gambar di atas, pencapaian indikator kinerja jumlah website milik Pemerintah Daerah menunjukkan hasil yang baik,

Namun demikian, Dinas Kominfo Provsu terus mendorong OPD di lingkungan Pemprovsu agar membuat website masing-masing instansi dan menghosting ke portal utama Pemprovsu. Hal ini mengingat pentingnya menyampaikan informasi pemerintahan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan amanat UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana “...*Setiap Badan Publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat.....*”. Pembuatan website merupakan salah satu bentuk dukungan dan prasyarat mutlak kunci suksesnya implementasi tata pemerintahan yang baik dan bersih melalui *e-government*.

4.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	Pameran / expo	4 kali	1 kali

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator jumlah pelaksanaan Pameran /Expo dengan persentase sebesar **25 %** dapat terlihat pada Gambar 3.1.3 (pameran/expo).



Namun demikian, Dinas Kominfo Provsu terus berupaya semaksimal mungkin memenuhi target yang diharapkan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini sangat penting, mengingat pameran/expo merupakan wadah yang strategis untuk mempromosikan berbagai keberhasilan yang dicapai oleh Pemprovsu kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan terbangunnya sinergitas dan partisipasi masyarakat dalam akselerasi pembangunan Sumatera Utara yang maju dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi dan analisis capaian kinerja organisasi berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas kinerja yang sudah diperjanjikan untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kominfo Provsu tahun 2013—2018. Pengukuran kinerja indikator masing-masing yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Kominfo Provsu dalam mewujudkan visi dan misi organisasi selama periode 2013—2018.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja Dinas Kominfo Provsu pada 2017 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan sasaran strategis sebesar **106 %** dengan kategori **“memuaskan”**. Capaian ini merupakan akumulasi dari capaian masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Kominfo Provsu pada 2017, yaitu :

1. ***Terwujudnya kualitas kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik.***

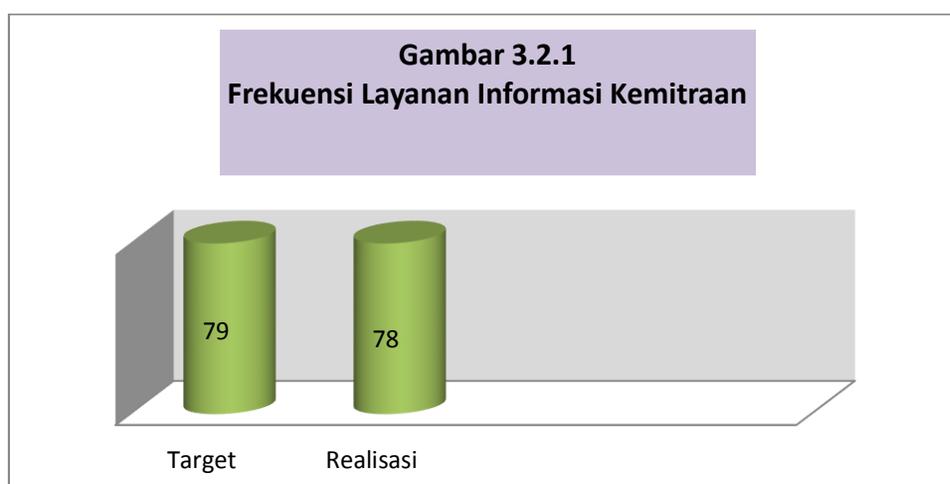
Capaian kinerja pada sasaran strategis pertama, yakni terwujudnya kualitas kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan

informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik mengalami perkembangan yang baik. Capaian pada sasaran strategis tersebut dipengaruhi oleh capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan.

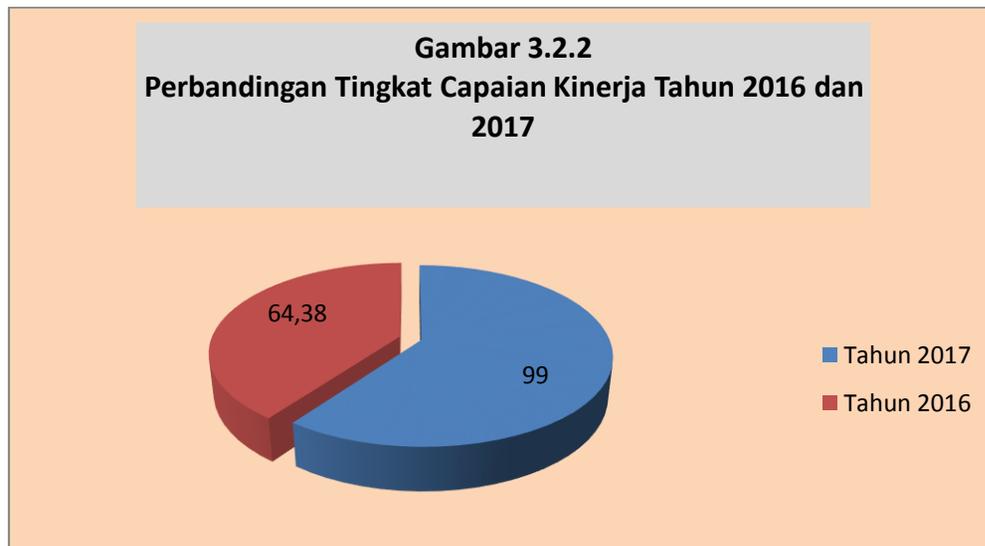
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Kominfo Provsu menetapkan 1 (satu) IKU dengan capaian indikator yakni Frekuensi layanan informasi kemitraan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Frekuensi Layanan Informasi Kemitraan	79 kali	78 kali	99

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja terwujudnya kualitas kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik berdasarkan indikator frekuensi layanan informasi kemitraan sebesar **99%** dengan kategori **"memuaskan"** dapat terlihat pada Gambar 3.2.1. (Frekuensi layanan informasi kemitraan).



Sebagaimana gambar di atas, pencapaian indikator kinerja frekuensi layanan informasi kemitraan mengalami peningkatan sebesar 34,62 %, dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2016, capaian indikatornya sebesar **64,38 %**.



Peningkatan layanan informasi kemitraan sangat penting dalam mendorong percepatan pembangunan masyarakat informasi Sumatera Utara yang maju dan berdaya saing. Masyarakat informasi dapat terwujud, manakala masyarakat memiliki kesadaran masyarakat untuk melek informasi. Menjadikan informasi sebagai kebutuhan dasar, seperti makan dan minum. Salah satu syarat tercapainya masyarakat informasi, tentu dengan kemudahan akses teknologi komunikasi, serta literasi memadai, agar teknologi tidak disalahgunakan (*unuseefull*).

Adapun ciri-ciri masyarakat informasi yang diharapkan yaitu :

1. Kebutuhan akan informasi sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat, baik untuk berinteraksi antar manusia maupun untuk menunjang kegiatan kerja, kegiatan Sosial, pengajaran, serta aktivitas lainnya,
2. Masyarakat informasi bergantung pada inovasi Teknologi yang terus berkembang,
3. *Spatial*, masyarakat informasi terhubung dengan lokasi yang mempunyai efek pada pengorganisasian waktu dan ruang,
4. *Occupational*, perubahan yang terjadi dalam masyarakat informasi menyebabkan perubahan dalam ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja di bidang informasi,
5. Masyarakat informasi mengalami perubahan siklus Budaya dalam kehidupan sehari-hari karena ketersediaan informasi dari berbagai saluran Media, termasuk Media sosial.

Melalui kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa diharapkan dapat terwujudnya masyarakat informasi Sumatera Utara. Hal ini diindikasikan semakin baiknya pelayanan informasi kepada publik melalui peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai lembaga media massa, kehumasan dan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kominfo Provsu mengembangkan kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa melalui program dan kegiatan, seperti: *Pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional, Tingkat Wilayah Pusat dan Nasional, Pertemuan Infokom/Humas Pemprovsu, Temu Konsultasi Bakohumas, , Lomba Karya Tulis/Lomba Foto Bagi Jurnalis dalam Rangka Hari Jadi Pemprovsu, Pembekalan Tata Kepemimpinan Jurnalis dalam Rangka Mendukung Good Governance, Forum Dialog, dan Iklan Layanan Masyarakat Adventorial dan Galeri.*

2. **Terwujudnya layanan informasi multimedia kepada publik yang mudah, cepat, akuntabel dan transparan.**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera telah memiliki layanan **Sumut Smart Province**

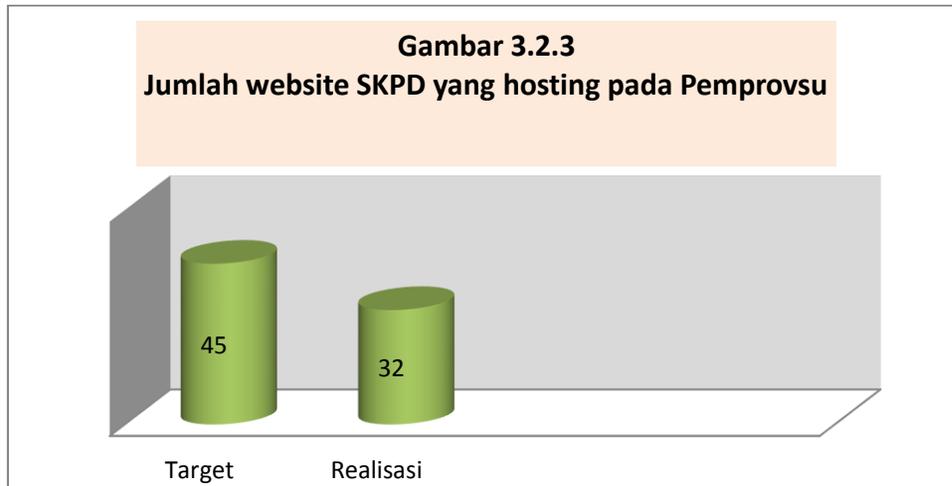
Layanan informasi multimedia kepada publik yang mudah, cepat, akuntabel dan transparan merupakan salah satu prasyarat dan kata kunci dalam mewujudkan masyarakat informasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pada sasaran strategis terwujudnya layanan informasi multimedia kepada publik yang mudah, cepat, akuntabel dan transparan dapat diketahui bahwa capaian kinerja **“baik”**.

Capaian pada sasaran strategis tersebut dipengaruhi oleh capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan, yakni jumlah website OPD yang hosting pada Pemprovsu.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah website SKPD yang hosting pada Pemprovsu.	45 website	32 website	71

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator kinerja jumlah website SKPD yang hosting pada Pemprovsu sebesar **71 %**.

Seperti terlihat pada Gambar 3.2.3 (Jumlah website SKPD yang hosting pada Pemprovsu).



Sebagaimana gambar di atas, pencapaian indikator kinerja jumlah website SKPD yang hosting pada Pemprov mengalami penurunan.

Pada tahun 2016 capaian indikator kinerja sebesar **75%**, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar **71 %**.



Berdasarkan hasil analisa capaian kinerja 2016, diketahui bahwa dari 49 OPD/unit kerja di lingkungan Pemprov yang telah hosting ke portal utama **www.sumutprov.go.id** sebanyak 32 OPD

Capaian indikator kinerja ini mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya SOTK baru sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah. Oleh karenanya, Dinas Kominfo Provsu akan terus bekerja keras mengoptimalkan segenap kemampuan dan sumber daya semua aparatur pemerintah di lingkungan Dinas Kominfo Provsu untuk mewujudkan target capaian yang diharapkan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov yang hosting pada website **www.sumutprov.go.id** dapat mendorong percepatan e-goverment di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam kaitannya pembangunan masyarakat informasi Sumatera

Utara yang maju dan berdaya saing. Penerapan e-goverment melalui *e-Office, e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement dan e-Performance*..

Namun demikian, capaian yang belum optimal pada 2016 ini akan menjadi bahan evaluasi dan dorongan bagi Dinas Kominfo Provsu untuk lebih meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan target yang diharapkan. Dalam upaya penerapan e-goverment di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kominfo Provsu sebagai SKPD yang memiliki tupoksi bidang urusan pengembangan komunikasi dan informatika di Sumatera Utara akan terus berupaya untuk mengkoneksikan website seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera dalam satu portal **www.sumutprov.go.id**. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan kemudahan informasi tentang pemerintahan Sumatera Utara secara komprehensif.

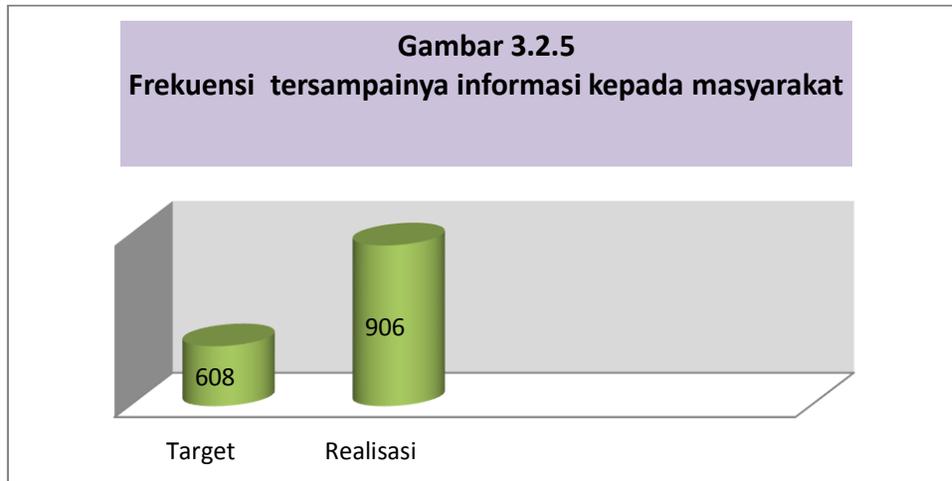
3. Terwujudnya pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi

Secara umum capaian kinerja pada sasaran strategis terwujudnya pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi **“memuaskan”**. Capaian pada sasaran strategis tersebut dipengaruhi oleh capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan.

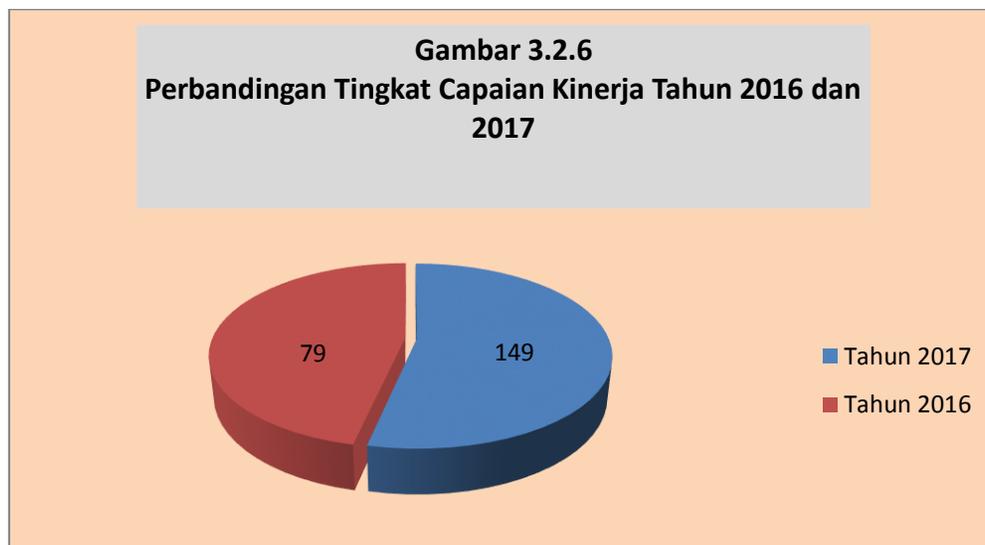
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Kominfo Provsu menetapkan 1 (satu) IKU dengan capaian indikator yakni frekuensi tersampainya informasi kepada masyarakat.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Frekuensi Tersampainya Informasi kepada Masyarakat	608 kali	906 kali	149

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja terwujudnya pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar **149 %**. Peningkatan layanan informasi kepada masyarakat dalam hal ini melalui Media TVRI dalam bentuk kegiatan Berita Sumut di TV lokal, yang merupakan informasi tentang Pembangunan di Sumatera Utara. Frekuensi tersampainya informasi kepada masyarakat seperti terlihat pada Gambar 3.2.5



Sebagaimana gambar di atas, pencapaian indikator kinerja frekuensi tersampainya Informasi kepada Masyarakat mengalami peningkatan. Jika dibandingkan 2016, capaian kinerjanya sebesar 79 %. Maka tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar **70 %**.



Frekuensi layanan informasi kepada masyarakat terjadi peningkatan yang cukup tinggi, dalam hal ini terlihat bahwa Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara terus berupaya dalam mewujudkan pemerataan akses informasi. Peningkatan Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya capaian kinerja Dinas Kominfo Provsu yang akan terus ditingkatkan agar terwujudnya pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan kemampuan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang mengakibatkan adanya kesenjangan kemampuan akses masyarakat terhadap informasi.

Melalui pemerataan akses informasi diharapkan informasi menjadi komoditi dan hanya bermanfaat apabila yang tersajikan dapat diintegrasikan dengan pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Untuk

itu dalam sistem desiminasi informasi perlu memperhatikan empat hal yaitu universalisme, nasionalisme, kelembagaan sosial, dan falsafah individu, sehingga informasi yang disebarluaskan itu diperhatikan dan mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain diseminasi informasi dapat bermanfaat menjadikan informasi sebagai suatu komoditi dan mempunyai nilai tambah atau kekuatan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Sumatera Utara.

Program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pemerataan akses informasi kepada masyarakat adalah Dialog interaktif melalui *Radio dan televisi Siaran, Pemberdayaan KIM di Kab/Kota Pementasan Pertunjukan Rakyat Media Tradisional di Kab /Kota, Sosialisasi Media Luar Ruang (Media Outdoor), Iklan Layanan Masyarakat dan kegiatan lainnya.*

3.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

Di samping capaian kinerja berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Renstra Dinas Kominfo Provsu yang telah dijelaskan di atas, maka untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang capaian kinerja Dinas Kominfo Provsu tahun 2017. Pada dokumen laporan kinerja 2017 ini akan dipaparkan capaian kinerja program/kegiatan secara keseluruhan dan berdasarkan penetapan kinerja Dinas Kominfo Provsu tahun 2017.

3.3.1 Capaian Kinerja Keseluruhan

Capaian kinerja keseluruhan Program Dinas Kominfo Provsu pada tahun 2017 sebesar **78,34 %** dengan kategori “**sangat baik**”. Jika dibandingkan pada tahun 2016 capaian kinerjanya sebesar **61,35 %**. Oleh karena terjadinya peningkatan sebesar **16,99 %**.

Untuk itu Capaian kinerja keseluruhan Program Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara yaitu :

No	Program	Realisasi capaian %	Kategori
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	93,38	memuaskan
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86,54	memuaskan
3	Disiplin Aparatur	89,96	memuaskan
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	69,15	Baik
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	84,59	memuaskan

6	Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga	77,98	Sangat baik
7	Peningkatan Kualitas Informasi Publik	69,99	Baik
8	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	82,63	Sangat baik

3.3.2 Capaian berdasarkan Penetapan Kinerja

Secara umum, capaian kinerja program/kegiatan Dinas Kominfo Provsu 2017 berdasarkan penetapan kinerja sudah menunjukkan adanya perkembangan yang sangat baik. Capaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2017 sebesar **106 %** dengan kategori **“memuaskan”**. Jika dibanding 2016, capaian kinerja **76,56 %** dengan kategori **“sangat baik”**. Artinya capaian kinerja pada 2017 mengalami peningkatan sebesar **29,44 %**. Adapun rincian capaian kinerja pada 2017 sebagai berikut :

No	Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Capaian (%)
1	Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga	79 kali	78 kali	99
2	Peningkatan Kualitas Informasi Publik	45 website	32 website	71
3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	608 kali	906	149
Rata-rata Capaian Program				106

3.4 ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

3.4.1. Analisa keberhasilan

Pada bahasan di atas, telah dijelaskan secara komprehensif bahwa secara umum capaian kinerja Renstra Dinas Kominfo Provsu pada tahun 2017 sebesar **106 %** dengan kategori **“memuaskan”**. Capaian keberhasilan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor - faktor pendorong yaitu :

1. Kerja keras, komitmen dan *goodwill* segenap aparatur Dinas Kominfo Provsu dalam melaksanakan program dan kegiatan,
2. Kuatnya sinergitas Dinas Kominfo Provsu dengan Stakeholder (PWI, IJTI, Bakohumas, TVRI, RRI, KIM dan Petra).

- Adanya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2012 tentang e-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

3.4.2. Analisis Alternatif Solusi yang Dilakukan

Dinas Kominfo Provsu melaksanakan langkah-langkah dalam perbaikan kinerja yaitu :

- Melakukan evaluasi, pengendalian dan monitoring terhadap kegiatan – kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana pentingnya (urgensinya) kegiatan tersebut dilaksanakan dan kemampuan dukungan dana yang tersedia;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas intensitas pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan bagi pegawai Dinas Kominfo Provsu, khususnya di bidang teknologi informasi;
- Meningkatkan sarana dan prasarana dibidang IT.

3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.5.1 Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan Dinas Kominfo Provsu pada tahun 2017

Anggaran belanja Dinas Kominfo Provsu TA. 2017 bersumber pada APBD Provinsi Sumatera Utara sebesar **Rp. 62.231.793.057,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 51.529.425.409,- (82,80 %)**. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah anggaran sebesar **Rp. 46.930.014.000,-** dengan realisasi **Rp. 31.864.060.785,-(67,90%)** berarti terjadi peningkatan sebesar **14,9 %**

Anggaran keseluruhan Dinas Kominfo Provsu TA. 2017 dirinci sebagai berikut:

No	Anggaran 2017	Target	Realisasi	%
1	Belanja Langsung	43.874.269.057,-	34.370.801.534,-	78,34
2	Belanja Tidak langsung	18.357.524.000,-	17.158.623.875,-	93,47
Total Anggaran		62.231.793.057,-	51.529.425.409,-	82,80

3.5.2 Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan Dinas Kominfo Provsu pada tahun 2017 Berdasarkan Sasaran Strategis

Berdasarkan akuntabilitas keuangan, anggaran keuangan yang digunakan untuk keempat sasaran strategis Dinas Kominfo Provsu pada tahun 2017 sebesar **Rp. 21.644.052.337,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 10.799.803.883,-,- (49.89 %)**, sedangkan realisasi target kinerjanya sebesar **106 %** yang terdiri dari :

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya kualitas kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik”,	4.065.092.575,-	2.963.645.890,-	79 kali	78 kali
2	Terwujudnya layanan informasi multimedia kepada publik yang mudah, cepat, akuntabel dan transparan	10.429.283.425,-	2.994.948.727,-	45 website	32 website
3	Terwujudnya pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi	7.149.676.337,-	4.841.209.266,-	608 kali	906 kali
J u m l a h		21.644.052.337,-	10.799.803.883,-	-	-

Pada sasaran strategis Terwujudnya layanan informasi multimedia kepada publik yang mudah, cepat, akuntabel dan transparan realisasi keuangan sangat rendah sekali, karena pada kegiatan pemakaian internet access dan lokal link dari provider kepemprov su adanya perubahan anggaran akses internet di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang mengakibatkan perubahan akses internet Dinas Kominfo Provsu.

Sedangkan pada sasaran strategis Terwujudnya pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi realisasi keuangannya juga rendah hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang di Komisi Penyiaran tidak dilaksanakan karena anggarannya dialihkan menjadi Hibah.

Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

Secara garis besar Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu telah berhasil melaksanakan tugas, fungsi, dan misi yang diembannya dalam mencapai sasaran strategis tahun 2017. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam perspektif prospek internal, sasaran strategis perspektif layanan, serta sasaran strategis perspektif pemangku kepentingan (kelembagaan) yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Tingkat capaian kinerja Dinas Kominfo Provsu pada tahun 2017 masuk dalam kategori **“Memuaskan”**, yaitu **106 %** yang didasarkan pada ketentuan skala penilaian peringkat kinerja. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016, capaian kinerja Dinas Kominfo Provsu mengalami peningkatan sebesar **29,44 %**, dimana pada tahun 2016 capaian kinerja Dinas Kominfo sebesar **76,56 %**.
- b. Dari sisi akuntabilitas keuangan, serapan keuangan Dinas Kominfo Provsu yang bersumber dari APBD TA. 2017 adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016, dimana pada tahun 2017 serapan keuangannya sebesar **82,80 %** dan tahun 2016 sebesar **67,90 %**. Artinya adanya peningkatan sebesar **14,90 %**.

Rekomendasi

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sepanjang tahun 2017 dan untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, perlu dilakukan hal-hal berikut:

1. Meningkatkan kualitas kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan akses pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi;
3. Meningkatkan layanan informasi multimedia kepada publik yang mudah, cepat dan akuntabel;
4. Peningkatan SDM bagi ASN melalui pelatihan, pendidikan dan Bimtek.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA

No (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Terwujudnya kualitas kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik;	Frekuensi layanan informasi kemitraan	79 kali
2.	Terwujudnya layanan informasi multimedia kepada publik yang mudah, cepat, akuntabel dan transparan;	Jumlah website SKPD yang hosting pada Pemprov	45 website
3.	Terwujudnya pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi;	Frekuensi tersampainya informasi kepada masyarakat	608 kali

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga	Rp. 4.065.092.575	APBD
2. Program Peningkatan Kualitas Informasi Publik	Rp. 10.429.283.425	APBD
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 7.149.676.337	APBD
JUMLAH	Rp. 21.644.052.337	

Medan, 2017

Gubernur Sumatera Utara

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara

(Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si)

(Drs. H. MHD. Fitriyus, SH, MSP)
Pembina Utama Madya
NIP. 19621003 198910 1 001

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA
Tahun Anggaran : 2017

No (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (3)	TARGET (4)	PROGRAM/KEGIATAN (5)	ANGGARAN (6)	KETERANGAN (7)
1.	Terwujudnya kualitas kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik;	Frekuensi layanan informasi kemitraan	79 kali	Program: Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga Kegiatan : 1. Coffee morning dengan stakeholder 2. Refleksi akhir Tahun 3. Pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional, Tingkat Wilayah Pusat dan Nasional 4. Pertemuan Infokom/Humas Pemprovsu 5. Temu Konsultasi Bakohumas 6. Lomba Karya Tulis/Lomba Foto Bagi Jurnalis dalam Rangka Hari Jadi Pemprovsu 7. Pembekalan Tata Kepemimpinan Jurnalis dalam Rangka Mendukung Good Government 8. Forum Dialog 9. Iklan Layanan Masyarakat Adventorial dan Galeri 10. Kajian Issu Publik 11. Bimbingan Tehnis Pejabat Pengelola informasi dan Dokumnetasi (PPID) Provsu 12. Kegiatan Forum Diskusi Komisi informasi Provsu 13. Penyelesaian sengketa informasi komisi Informasi Provsu 14. Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan non Pemerintah tentang komisi Informasi	Rp 4.065.092.575 Rp 218.300.000 Rp 63.400.000 Rp 42.340.000 Rp 333.730.000 Rp 376.305.000 Rp 144.850.000 Rp 423.564.000 Rp 349.043.732 Rp 933.886.843 Rp 82.200.000 Rp 76.808.000 Rp 25.125.000 Rp 938.360.000 Rp 22.850.000	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV dilaksanakan di Triwulan IV dilaksanakan di Triwulan II dan III dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV dilaksanakan di triwulan I dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV dilaksanakan di Triwulan II dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV dilaksanakan di Triwulan II dilaksanakan di Triwulan II dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV dilaksanakan di Triwulan II

				15 Dialog Publik tentang Keterbukaan Informasi	Rp	14.980.000	dilaksanakan di Triwulan II
				16 Dialog di Media Massa RRI,TVRI,Deli TV dan 3 Radio Swasta	Rp	19.350.000	dilaksanakan di Triwulan II
2.	Terwujudnya layanan informasi multimedia kepada publik yang mudah, cepat, akuntabel dan transparan;	Jumlah website SKPD yang hosting pada Pemprov	45 website	Program: Program Peningkatan Kualitas Informasi Publik	Rp	10.429.283.425	
				Kegiatan : 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Melalui Website sumutprov.go.id	Rp	62.773.425	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				2. Pemakaian Internet Access dan Local Link dari Provider ke Pemprov	Rp	9.961.600.000	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				3. Peningkatan kualitas pelayanan Informasi Melalui Website diskominfo Provsu	Rp	60.260.000	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				4. Koneksi internet layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Provinsi Dumatera Utara	Rp	344.650.000	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
3	Terwujudnya pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi;	Frekuensi tersampainya informasi kepada masyarakat	671 kali	Program: Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp	7.149.676.337	
				Kegiatan : 1. Dialog interaktif melalui Radio Siaran	Rp	56.650.000	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				2. Dialog interaktif melalui Televisi Siaran	Rp	184.554.000	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				3. Pementasan Pertunjukan Rakyat Media Tradisional di Kab /Kota	Rp	86.589.962	dilaksanakan di Triwulan II
				4. Pemberdayaan KIM di Kab/Kota	Rp	799.000.000	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				5. Workshop Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tahun 2017	Rp	73.474.200	dilaksanakan di Triwulan II dan IV
				6. Sosialisasi Media luar ruang (Media Outdoor)	Rp	3.441.045.000	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				7. Pagelaran Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional	Rp	232.180.000	dilaksanakan di Triwulan III
				8. Pekan Raya Sumatera Utara Tahun 2017	Rp	65.288.625	dilaksanakan di Triwulan I
				9. Diskusi Panel/Sarasehan Hari Bersejarah dan Kenegaraan	Rp	121.702.250	dilaksanakan di Triwulan II,III dan IV
				10. Aspirasi Publik di RRI	Rp	93.500.000	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				11. Ayo Tanya Dokter di RRI	Rp	23.687.400	dilaksanakan di Triwulan I,II dan III
				12. Anak Cerdas Kita di RRI	Rp	43.550.000	dilaksanakan di Triwulan II , III dan IV

				13. Berita Sumut di TV Lokal	Rp	241.000.000	dilaksanakan Triwulan I,II,III dan IV
				14. Mimbar Agama di TVRI	Rp	570.175.000	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				15. Siaran Tunda di TVRI	Rp	11.400.000	dilaksanakan di Triwulan II
				16. Iklan Layanan Masyarakat	Rp	337.600.000	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				17. Lomba Pementasan Media Tradisional Kab / Kota	Rp	106.000.000	dilaksanakan di Triwulan II
				18. Lomba Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Rp	80.400.000	dilaksanakan di Triwulan II
				19. Pementasan Media Tradisional melalui Televisi	Rp	32.794.800	dilaksanakan di Triwulan I
				20 KPID Award	Rp	214.721.300	dilaksanakan di Triwulan IV
				21 Sosialisasi Pemahaman Isis siaran yang sehat kepada Lembaga Pendidikan	Rp	96.409.400	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				22 Sosialisasi, Edukasi dan literasi Media bagi Masyarakat dan Lembaga Penyiaran di Sumatera Utara	Rp	66.334.800	dilaksanakan di Triwulan II dan IV
				20. Pembinaan Teknis Perizinan	Rp	115.394.600	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				21. Pemuktahiran Data Lembaga Penyiaran dan Verifikasi Faktual Lembaga Penyiaran	Rp	56.225.000	dilaksanakan di Triwulan I

Jumlah Anggaran TA 2017 : Rp 21.644.052.337

Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga : Rp 4.065.092.575

Program Peningkatan Kualitas Informasi Publik : Rp 10.429.283.425

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa : Rp 7.149.676.337

Gubernur Sumatera Utara

(Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si)

Medan, 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara

(Drs. H. MHD. Fitriyus, SH, MSP)
Pembina Utama Madya
NIP. 19621003 198910 1 001

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA
 Tahun Anggaran : 2017

No (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (3)	TARGET (4)	PROGRAM/KEGIATAN (5)	ANGGARAN (6)	REALISASI ANGGARAN (7)	REALISASI TARGET (8)	KETERANGAN (9)
1.	Terwujudnya kualitas kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik;	Frekuensi layanan informasi kemitraan	79 kali	Program: Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga Kegiatan :	Rp 4.065.092.575	Rp 2.963.645.890	78 Kali	
				1. Coffee morning dengan stakeholder	Rp 218.300.000	Rp 174.100.000	8 Kali	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				2. Refleksi akhir Tahun	Rp 63.400.000	Rp 48.150.000	1 kali	dilaksanakan di Triwulan IV
				3. Pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional, Tingkat Wilayah Pusat dan Nasional	Rp 42.340.000	Rp 35.332.550	2 kali	dilaksanakan di Triwulan II dan III
				4. Pertemuan Infokom/Humas Pemprovsu	Rp 333.730.000	Rp 211.364.795	4 kali	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				5. Temu Konsultasi Bakohumas	Rp 376.305.000	Rp 243.030.000	3 kali	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				6. Lomba Karya Tulis/Lomba Foto Bagi Jumalis dalam Rangka Hari Jadi Pemprovsu	Rp 144.850.000	Rp 138.850.000	1 kali	dilaksanakan di triwulan I
				7. Pembekalan Tata Kepemimpinan Jumalis dalam Rangka Mendukung Good Government	Rp 423.564.000	Rp 263.944.085	2 kali	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				8. Forum Dialog	Rp 349.043.732	Rp 286.005.732	4 kali	dilaksanakan di Triwulan II
				9. Iklan Layanan Masyarakat Advertorial dan Galeri	Rp 933.886.843	Rp 1.270.804.078	1 tahun	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				10. Kajian Issu Publik	Rp 82.200.000	-	-	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				11. Bimbingan Tehnis Pejabat Pengelola informasi dan Dokumnetasi (PPID) Provsu	Rp 76.808.000	Rp 71.214.600	1 kali	dilaksanakan di Triwulan II
				12. Kegiatan Forum Diskusi Komisi informasi Provsu	Rp 25.125.000	Rp 25.125.000	1 kali	dilaksanakan di Triwulan II
				13. Penyelesaian sengketa informasi komisi Informasi Provsu	Rp 938.360.000	Rp 158.444.600	48 kali	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				14. Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan non Pemerintah tentang komisi Informasi	Rp 22.850.000	Rp 22.850.000	1 kali	dilaksanakan di Triwulan II

				15 Dialog Publik tentang Keterbukaan Informasi	Rp 14.980.000	Rp 14.430.450	1 kali	dilaksanakan di Triwulan II
				16 Dialog di Media Massa RRI,TVRI,DelI TV dan 3 Radio Swasta	Rp 19.350.000	-	-	dilaksanakan di Triwulan II
2.	Terwujudnya layanan informasi multimedia kepada publik yang mudah, cepat, akuntabel dan transparan;	Jumlah website SKPD yang hosting pada PemprovSU	45 website	Program: Program Peningkatan Kualitas Informasi Kegiatan : 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Melalui Website sumutprov.go.id	Rp 10.429.283.425	Rp 2.994.948.727	1 Tahun	
				2. Pemakaian Internet Access dan Local Link dari Provider ke PemprovSU	Rp 9.961.600.000	Rp 2.563.457.784	1 tahun	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				3. Peningkatan kualitas pelayanan Informasi Melalui Website diskominfo Provsu	Rp 60.260.000	Rp 49.992.475	1 tahun	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				4. Koneksi internet layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Provinsi Dumatera Utara	Rp 344.650.000	Rp 336.049.775	1 tahun	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
3	Terwujudnya pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi;	Frekuensi tersampainya informasi kepada masyarakat	608 kali	Program: Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : 1. Dialog interaktif melalui Radio Siaran	Rp 7.149.676.337	Rp 4.841.209.266	906 Kali	
				2. Dialog interaktif melalui Televisi Siaran	Rp 184.554.000	Rp 181.604.000	11 kali	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				3. Pementasan Pertunjukan Rakyat Media Tradisional di Kab /Kota	Rp 86.589.962	Rp 117.999.962	18 kali	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				4. Pemberdayaan KIM di Kab/Kota	Rp 799.000.000	Rp 773.640.798	3 kali	dilaksanakan di Triwulan II
				5. Workshop Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tahun 2017	Rp 73.474.200	Rp 35.925.000	20 kali	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				6. Sosialisasi Media luar ruang (Media Outdoor)	Rp 3.441.045.000	Rp 1.590.307.360	1 kali	dilaksanakan di Triwulan II dan IV
				7. Pagelaran Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional	Rp 232.180.000	Rp 155.068.000	1 tahun	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				8. Pekan Raya Sumatera Utara Tahun 2017	Rp 65.288.625	Rp 58.338.625	1 kali	dilaksanakan di Triwulan III
				9. Diskusi Panel/Sarasehan Hari Bersejarah dan Kenegaraan	Rp 121.702.250	Rp 118.722.250	1 kali	dilaksanakan di Triwulan I
				10. Aspirasi Publik di RRI	Rp 93.500.000	Rp 89.576.387	3 kali	dilaksanakan di Triwulan II,III dan IV
				11. Ayo Tanya Dokter di RRI	Rp 23.687.400	Rp 22.287.400	10 kali	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				12. Anak Cerdas Kita di RRI	Rp 43.550.000	Rp 43.550.000	6 kali	dilaksanakan di Triwulan I,II dan III
							10 kali	dilaksanakan di Triwulan II , III dan IV

				13. Berita Sumut di TV Lokal	Rp 241.000.000	Rp 334.000.000	700 kali	dilaksanakan Triwulan I,II,III dan IV
				14. Mimbar Agama di TVRI	Rp 570.175.000	Rp 557.350.000	108 kali	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				15. Siaran Tunda di TVRI	Rp 11.400.000	Rp 11.400.000	1 kali	dilaksanakan di Triwulan II
				16. Iklan Layanan Masyarakat	Rp 337.600.000	Rp 297.700.000	1 kali	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				17. Lomba Pementasan Media Tradisional Kab / Kota	Rp 106.000.000	Rp 101.090.000	1 kali	dilaksanakan di Triwulan II
				18. Lomba Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Rp 80.400.000	Rp 79.590.200	1 kali	dilaksanakan di Triwulan II
				19. Pementasan Media Tradisional melalui Televisi	Rp 32.794.800	Rp 32.194.800	1 kali	dilaksanakan di Triwulan I
				20. KPID Award	Rp 214.721.300	-	-	dilaksanakan di Triwulan IV
				21. Sosialisasi Pemahaman Isis siaran yang sehat kepada Lembaga Pendidikan	Rp 96.409.400	Rp 22.664.800	3 kali	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				22. Sosialisasi, Edukasi dan literasi Media bagi Masyarakat dan Lembaga Penyiaran di Sumatera Utara	Rp 66.334.800	Rp 42.928.650	2 kali	dilaksanakan di Triwulan II dan IV
				20. Pembinaan Teknis Perizinan	Rp 115.394.600	Rp 84.109.850	2 kali	dilaksanakan di Triwulan I,II,III dan IV
				21. Pemuktahiran Data Lembaga Penyiaran dan Verifikasi Faktual Lembaga Penyiaran	Rp 56.225.000	Rp 37.931.000	2 kali	dilaksanakan di Triwulan I

Jumlah Anggaran TA 2017 : **Rp 21.644.052.337**
 Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga : Rp 4.065.092.575
 Program Peningkatan Kualitas Informasi Publik : Rp 10.429.283.425
 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa : Rp 7.149.676.337